

**Judul** : Rahayu Saraswati mundur dari DPR pascakontroversi  
**Tanggal** : Kamis, 11 September 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## Rahayu Saraswati Mundur dari DPR Pascakontroversi

Fraksi Partai Gerindra DPR menghormati keputusan Rahayu Saraswati mundur dari DPR dan akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS — Politik Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengundurkan diri sebagai anggota DPR 2024-2029. Pernyataan kontroversial yang disampaikan dalam sebuah siaran pada Februari 2025 menjadi alasan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mundur dari parlemen. Publik menilai pernyataan Saraswati telah menyakiti hati rakyat.

Keputusan mundur dari DPR disampaikan Saraswati melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9/2025). Meski dibuat pada Februari 2025, potongan siaran itu viral dan mendapat kritikan dari warganet pada Agustus 2025.

"Walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong *entrepreneurship*, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup," kata Saraswati dalam video di akun Instagram pribadinya.

Dalam pernyataan yang viral pada Agustus lalu, politikus Gerindra yang kerap dipanggil Sara menyebut bahwa pola pikir anak muda yang mengharapkan lowongan kerja dari pemerintah sama seperti di era penjajahan kolonial. "Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha.

Jadilah *entrepreneur* daripada *ngomel* enggak ada kerjaan. Bikin kerjaan buat teman-teman lu," kata Sara dalam potongan siaran yang viral di media sosial.

Sara mengakui, pernyataan itu telah menyinggung dan melukai hati masyarakat. Ia menegaskan tidak ada maksud melukai hati masyarakat dalam perbincangannya di dalam program siaran tersebut.

Sara pun meminta publik untuk menonton seluruh perbincangannya di siaran yang berjudul "Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif" di akun Youtube Antara TV agar masyarakat mengetahui apa yang disampaikan secara menyeluruh.

"Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya," tuturnya.

Meski mundur, Sara berharap masih diberi kesempatan menyelesaikan pembahasan RUU Kepariwisata di Komisi VII DPR. Ia juga berjanji akan menyalurkan sisa dana dari bantuan alat kesehatan, pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan pemuda.

Di akhir potongan video, Sara juga mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada dirinya.

Sara terpilih dalam Pemilu 2024 dari dapil DKI Jakarta 3. Sara pun kemudian duduk di Komisi VII DPR yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

"Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini," ujarnya.

### Dinonaktifkan

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi mengesahkan, fraksinya menghormati keputusan Sara tersebut. Pihaknya akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Sementara menunggu proses, maka Saudara Sara akan dinonaktifkan dari DPR," kata Bambang.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra DPR akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra untuk membicarakan tindak lanjut dari mundurnya Sara. Bambang memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.

Mundurnya Sara menambah panjang daftar anggota DPR yang dinonaktifkan. Sebelumnya, lima anggota DPR dinonaktifkan oleh partai yang menyusul pernyataan dan tindakan kontroversial yang dinilai mencederai perasaan publik.

Dua di antaranya berasal dari Fraksi Partai Nasdem, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Tiga lainnya adalah Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya

(PAN), serta Adies Kadir (Partai Golkar).

Rumah Sahroni, Uya Kuya, dan Eko bahkan menjadi sasaran kemarahan publik. Rumah ketiga anggota DPR nonaktif itu dijajah di saat sebagian publik tengah berunjuk rasa memprotes tunjangan perumahan DPR di berbagai daerah.

### Perombakan kabinet

Tidak lama setelah unjuk rasa berujung kerusuhan pecah di sejumlah daerah, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi Kabinet Merah Putih. Pada Senin (8/9), lima menteri diberhentikan. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perlindungan Pekerja Abdul Kadir Karding, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan), dan Mukhtanudin (Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Selain itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diaduk sebagai Menko Polkam ad interim.

Sementara itu, hingga Rabu, Presiden belum menetapkan dan melantik Menteri Pemuda dan Olahraga pengganti Dito Ariotedjo. "Berkenaan dengan

Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga, kebutuhan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini (Senin)," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan.

Saat ini, beredar sejumlah nama yang disebut-sebut akan ditetapkan sebagai Menpora. Salah satunya politikus Partai Golkar yang kini menjabat anggota DPR, Puteri Komaruddin. Belakangan mencuat dua nama kandidat pengganti Dito, yakni pesohor Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni serta mantan pebalap Moreno Soeprapto. Raffi juga kerap terlihat mendampingi salah satu orang dekat Prabowo, yang menjabat Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Sementara itu, pada Rabu Dasco menemui Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dasco mengaku datang ke Istana untuk menyampaikan sejumlah keputusan yang telah disepakati di DPR dalam beberapa hari terakhir ini.

Secara terpisah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memastikan perombakan kabinet telah diperhitungkan matang oleh Presiden. Soal kinerja jadi salah satu alasan kebijakan itu diambil. Langkah itu diharapkan mampu memaksimalkan kinerja mesin pemerintahan dalam waktu mendatang.

(DIT/ NIA/ INA/ NCA)